

Bab III

KEPENTINGAN JERMAN

DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Bab ini akan membahas tentang kepentingan Jerman di kawasan Asia Tenggara. Topik bahasan ini penting untuk memahami dasar kebijakan luar negeri yang dimiliki Jerman dalam kerangka kerjasama bilateral dengan Indonesia yang nantinya akan dibahas pada bab IV.

Melalui Jerman Kementerian Luar Negerinya memandang bahwa konsep kebijakan luar negeri untuk kawasan Asia tidak dapat didefinisikan secara seragam mengingat adanya keragaman politik, sosial serta budaya yang ada di kawasan tersebut. Perbedaan antara negara yang besar dan kecil, yang kaya dan miskin, bentuk pemerintahan yang otoriter dan demokratis serta perbedaan agama dapat ditemukan di kawasan Asia. Perbedaan itulah yang kemudian membuat Jerman pada 2002 mengembangkan konsep kebijakan luar negeri berdasarkan kawasan, yang secara khusus ditujukan untuk kawasan Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tenggara dan Pasifik. Sebelumnya pada 1993 Jerman juga membuat kebijakan luar negeri namun kebijakan tersebut ditujukan untuk kawasan Asia secara keseluruhan¹.

Pada awal tahun 1990an, kepentingan Jerman di Asia dipusatkan pada aspek-aspek kerjasama ekonomi antara Jerman dan Asia, seperti penguatan integrasi perusahaan Jerman di kawasan Asia Pasifik, orientasi pasar ekonomi lokal serta kerjasama dalam bidang Sains dan Teknologi (S&T). Berakhirnya Perang Dingin, krisis keuangan Asia pada 1997, serangan teroris pada 11 September 2001, proses integrasi ASEAN, pembangunan ekonomi di Asia pada awal abad ke-21 serta meningkatnya peran beberapa negara di Asia karena

¹ Dikutip dari website Kementerian Luar Negeri Jerman (*Auswärtiges Amt*) [www. Auswaertiges-amt.de/diplo/en/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/Asien/Asienpolitik](http://www.Auswaertiges-amt.de/diplo/en/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/Asien/Asienpolitik) yang diakses pada 10 Nopember 2010, pukul 16.00 wib.

pengaruh globalisasi, merupakan peristiwa-peristiwa yang mau tidak mau membuat Jerman harus melakukan reorientasi kebijakannya di Asia².

Berikut akan dijelaskan tentang dua kebijakan luar negeri Jerman, yakni yang dikeluarkan pada 1993 yang ditujukan untuk kawasan Asia-Pasifik (termasuk di dalamnya Cina, India, Jepang, negara-negara Asia Tenggara hingga kawasan Pasifik) dan kebijakan yang dikeluarkan pada 2002 untuk kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, di mana di dalamnya termasuk Australia, New Zealand dan Kepulauan Pasifik. Namun ruang lingkup penjelasan kebijakan luar negeri tahun 1993 hanya akan dibatasi untuk kawasan Asia Tenggara karena terkait dengan topik penelitian ini yang mengambil studi kasus Indonesia.

3.1. Kebijakan Luar Negeri Jerman untuk Kawasan Asia tahun 1993

Dalam dokumen *Asien-Konzept der Bundesregierung* (Konsep Asia Pemerintah Federal)³ disebutkan bahwa kawasan Asia-Pasifik memiliki peluang yang cukup besar pada abad ke-21. Kebijakan luar negeri yang aktif untuk kawasan Asia-Pasifik merupakan komponen penting dalam politik global untuk menjamin perdamaian dunia. Jerman melihat bahwa hampir separuh dari penduduk dunia berada di kawasan Asia. Dengan pertumbuhan ekonominya yang sebesar 7% - 8%, Asia merupakan kawasan yang dinamis di dunia. Dalam Konsep Asia-Pasifik tersebut disebutkan:

Japan hat den Anfang gemacht. Korea, Hong Kong, Taiwan sowie Singapur und die meisten anderen ASEAN-Staaten haben in den 80er Jahren aufgeholt. Nunmehr nimmt der „groß-chinesische Wirtschaftsraum“ in atemberaubendem Tempo seinen Aufschwung. Indien öffnet sich stärker der Weltwirtschaft. Vietnam und andere werden folgen. 1960 erzeugte Asien 4% des BSP⁴ der Welt; heute sind es 25%; in zehn Jahren werden es möglicherweise ein Drittel es Weltsozialproduktes sein. Riesige Märkte für Konsumgüter sowie für hochwertige Nahrungsmittel entstehen. Große Infrastrukturprogramme werden aufgelegt.

² *ibid*

³ Konsep Asia-Pasifik ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jerman pada 25 Oktober 1993.

⁴ BSP merupakan singkatan dari *Bruttosozialprodukt* yang juga berarti sebagai GNP (*Gross National Product*).

Jepang adalah negara yang terlebih dahulu memimpin di kawasan. Kemudian Korea, Hongkong, Taiwan dan Singapura serta sebagian besar negara ASEAN lainnya pada 1980an mampu mengejar Jepang. Saat ini wilayah ekonomi raksasa Cina perlahan-lahan menunjukkan perbaikan. India telah membuka diri bagi perekonomian dunia. Vietnam dan negara lainnya diprediksi akan segera menyusul. Pada 1960, 4% dari GNP dunia berasal dari Asia, sedangkan saat ini (pada 1993) GDP Asia telah meningkat menjadi 25%, dan dalam sepuluh tahun mendatang, GNP Asia diperkirakan akan meningkat menjadi sepertiga dari GNP dunia. Hal tersebut akan menciptakan pasar yang sangat besar untuk barang-barang konsumen dan makanan yang memiliki kualitas tinggi.

Jerman melihat bahwa perusahaan-perusahaan di Asia telah memiliki kemampuan teknologi yang membuat mereka mampu bersaing di dunia global. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan kawasan Pasifik pada tahun 1990an menawarkan kesempatan yang cukup besar bagi perekonomian Jerman untuk saat ini dan untuk waktu yang akan datang. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kemampuan inovasi industri dan politik ekonomi Jerman. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa secara politik, negara-negara seperti Jepang, Cina dan India memiliki posisi tawar yang cukup besar, di mana hal yang sama juga akan segera berlaku bagi Indonesia dan Korea. Konsep kebijakan luar negeri 1993 memiliki enam fokus bidang kerjasama yang ingin dikembangkan oleh Jerman dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Enam fokus bidang tersebut antara lain (1) kerjasama ekonomi, (2) kerjasama S&T, (3) kerjasama lingkungan hidup, (4) kerjasama telekomunikasi, (5) kerjasama pembangunan, dan (6) pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya, pendidikan kejuruan, dialog media dan dialog sosial. Berikut akan dijelaskan tentang enam fokus bidang kerjasama tersebut.

Pertama kerjasama ekonomi. Tujuan politik bidang ini ialah untuk mendorong perluasan kerjasama ekonomi dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Keterlibatan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kerjasama dalam bidang teknologi harus diperkuat. Pemerintah Jerman memandang bahwa kehadirannya di kawasan Asia-Pasifik penting sebagai upaya untuk menarik

investasi asing masuk ke Jerman, khususnya ke negara-negara bagian baru⁵ Jerman. Perdagangan di kawasan Asia-Pasifik juga menjadi perhatian dalam perekonomian dan politik ekonomi luar negeri Jerman.

Kedua kerjasama dalam bidang S&T. Jepang, Korea dan negara-negara di Asia Tenggara dipastikan akan turut mengambil bagian dalam menentukan teknologi masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir terlihat bahwa perjanjian kerjasama dengan Jepang, Cina, India, Korea, Indonesia, Australia dan New Zealand telah menghasilkan dialog dan jaringan ilmuwan yang erat melalui proyek-proyek kerjasama penelitian dan pengembangan, sehingga kerjasama dalam bidang ini harus terus dilanjutkan dan dikembangkan. Saat ini beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik telah membangun kapasitas penelitian dan pengembangan sendiri. Inisiasi kerjasama oleh perusahaan-perusahaan Jerman dengan negara-negara mitra di kawasan Asia-Pasifik difokuskan pada produk-produk berteknologi tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk membuka perspektif baru bagi investasi langsung dan *Joint Venture*⁶ bagi teknologi yang berasal dari Jerman. Sebagai negara yang memiliki teknologi terkemuka, Jerman memang menaruh perhatian yang lebih besar terhadap bidang manufaktur, energi dan lingkungan hidup. Di samping itu terdapat peningkatan kebutuhan di kawasan Asia-Pasifik terhadap produk-produk penelitian dan keterlibatan ekonomi Jerman. Kegiatan transfer teknologi hingga *Joint Venture* yang berbasis teknologi merupakan peluang untuk membuka pasar baru. Dukungan terhadap kegiatan transfer teknologi di Jerman tertuang dalam perjanjian kerjasama S&T dan kerjasama ekonomi.

Ketiga kerjasama lingkungan hidup. Kegiatan industrialisasi dan pertumbuhan penduduk di kawasan Asia-Pasifik telah memberi dampak yang

⁵ Negara-negara bagian baru yang dimaksud di atas antara lain Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen dan Thüringen. Negara-negara tersebut sebenarnya sudah ada sebelumnya, namun semasa Perang Dingin mereka termasuk ke dalam Jerman Timur yang berada di bawah kekuasaan Republik Demokrasi Jerman (*Deutsche Demokratische Republik*).

⁶ *Joint venture* adalah suatu bentuk kerjasama di antara dua orang atau dua badan usaha atau lebih untuk mengadakan suatu usaha dengan karakteristik bahwa usaha tersebut memiliki waktu yang terbatas, masing-masing pihak menyerahkan kontribusi berupa uang atau barang, kerugian dan keuntungan dibagi sama serta untuk pihak-pihak yang berjasa maka bunga modal, komisi, bonus dan lain-lain akan diperhitungkan.

cukup signifikan terhadap kerusakan lingkungan, baik di tingkat lokal, regional maupun di tingkat global. Meningkatnya permintaan energi yang sebagian besar dipenuhi melalui penggunaan teknologi usang dan masih menggunakan bahan bakar fosil, mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu promosi penggunaan teknologi yang ramah energi dan pemanfaatan energi alternatif sangat diperlukan. Program tersebut sangat diminati di Cina, India, Indonesia dan di negara-negara yang memiliki potensi pertumbuhan CO₂ yang tinggi. Selain melahirkan harapan yang besar terhadap investasi asing, program tersebut juga memunculkan harapan akan adanya bantuan keuangan dari negara Barat. Menanggapi hal tersebut, kerjasama lingkungan hidup Jerman akan memfokuskan program kegiatannya untuk bidang tersebut di atas, meskipun pemanfaatan teknologi lingkungan hidup buatan Jerman juga perlu ditingkatkan sejauh mungkin. Hingga saat ini Jerman hanya memiliki perjanjian kerjasama dalam bidang perlindungan lingkungan hidup dengan Australia, Cina, Singapura dan Indonesia. Perjanjian kerjasama tersebut difokuskan dalam bidang polusi udara, meminimalisasi produksi limbah termasuk di dalamnya daur ulang dan pembuangan limbah, pengolahan air limbah termasuk di dalamnya pembuangan dan pencegahan air limbah, keselamatan instalasi, keamanan kimia, pemantauan kerusakan lingkungan termasuk di dalamnya pengukuran, manajemen dan administrasi. Masa depan kerjasama lingkungan hidup tersebut harus diawali dengan transfer teknologi dan transfer pengetahuan serta langkah-langkah penerapannya. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut, negara-negara di kawasan Asia-Pasifik membutuhkan dukungan untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, seperti hutan tropis dan pengolahan lahan, yang dapat dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan maupun ke dalam pembuatan struktur administrasi lingkungan hidup yang efisien. Hal ini dapat membuka peluang bagi industri Jerman untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.

Keempat telekomunikasi. Banyak negara di kawasan Asia-Pasifik seperti Jepang, Cina, Indonesia, Korea dan Thailand mengakui bahwa telekomunikasi merupakan sektor kunci dalam pembangunan dengan tujuan untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi. Tujuan kebijakan pemerintah Jerman dalam bidang ini disesuaikan dengan negara mitranya, antara lain (1) kerjasama dalam bidang telekomunikasi dengan negara-negara seperti Jepang, Australia dan New Zealand, akan memberi banyak manfaat untuk saling bertukar pengalaman khususnya dalam liberalisasi dan privatisasi sektor telekomunikasi; (2) sedangkan kebijakan untuk negara berkembang seperti Cina, Korea dan Hongkong, kerjasama bidang telekomunikasi ditujukan untuk saling bertukar pengalaman untuk meneruskan kebijakan regulasi Jerman. Ini dilakukan dengan harapan untuk lebih meningkatkan kerjasama dan potensi pasar bagi industri telekomunikasi Jerman; (3) menjadikan kerjasama ini sebagai media promosi untuk mengenalkan standar telekomunikasi Eropa, seperti standar GSM untuk pasar masa depan telepon genggam, di mana hal tersebut akan memperbesar peluang bisnis bagi penyedia jasa layanan telekomunikasi asal Jerman; (4) tujuan berikutnya yaitu untuk mempromosikan jaringan operator telekomunikasi Jerman. Untuk mengetahui *trend* dari para penyedia jaringan operator dari negara lain, seperti USA, Inggris, Jepang dan Perancis, diperlukan sebuah kebijakan untuk memperkuat kemampuan bersaing bagi para penyedia jasa layanan telekomunikasi Jerman. Hal tersebut nantinya berguna untuk menjamin eksistensi jangka panjang bagi perusahaan Jerman tersebut.

Kelima kerjasama pembangunan. Tujuan umum dari kerjasama pembangunan ini ialah untuk meningkatkan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di kawasan Asia-Pasifik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peraturan ekonomi dan peraturan sosial yang ramah terhadap kebutuhan pasar, pengembangan orientasi perdagangan, penghormatan terhadap HAM, partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan serta adanya jaminan hukum. Perang melawan kemiskinan dapat dilakukan melalui promosi pekerjaan yang produktif dan kebijakan dalam bidang promosi pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut merupakan fokus kerjasama pembangunan dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, baik yang kaya maupun yang miskin. Negara-negara berkembang di kawasan Asia-Pasifik harus mampu berkompetisi melalui transfer teknologi dan keterampilan teknis yang berkualitas. Dukungan kerjasama bagi sektor swasta dalam kerangka kerjasama pembangunan dapat dilakukan melalui perbaikan

undang-undang investasi, pendidikan kejuruan, teknologi tinggi, serta promosi kerjasama antar negara.

Keenam kerjasama dalam bidang pendidikan, sains dan budaya, pendidikan kejuruan, dialog media dan dialog sosial. Jerman saat ini (1993) merasa kurang akrab dengan arus intelektual, arus emosi serta arus budaya di negara-negara Asia-Pasifik meskipun Jerman memiliki hubungan tradisional yang baik dengan para pemimpin di negara-negara tersebut. Hubungan kebudayaan yang telah terjalin dengan negara-negara Asia-pasifik semakin melemah. Sehingga tidak mengherankan jika universitas-universitas di Jerman yang sebelumnya memainkan peran penting dalam bidang pendidikan bagi anak-anak muda dari keluarga kaya di Indonesia dan di Thailand, saat ini (1993) telah kehilangan pengaruhnya dalam bidang pendidikan. Berbeda dengan Cina yang memanfaatkan universitas dan fasilitas pelatihan teknis Jerman secara menyeluruh. Untuk memperbaiki situasi tersebut, pemerintah Jerman telah menetapkan beberapa langkah, antara lain: (1) dalam bidang pendidikan tinggi, pemerintah Jerman harus lebih aktif untuk berinisiatif menjemput para pemimpin dari sekolah-sekolah tinggi dari kawasan Asia-Pasifik untuk berkunjung ke Jerman. Di samping itu, mahasiswa Jerman juga memiliki peran yang sangat penting untuk membantu membangunkan kembali kepercayaan negara-negara Asia-Pasifik terhadap Jerman; (2) pemberian beasiswa akan lebih difokuskan kepada mahasiswa paska sarjana dan ilmuwan yang akan dibuat dalam bingkai kerjasama dengan mitra perguruan tinggi yang sudah ada; (3) pertukaran informasi terkait dengan proyek kerjasama harus terus dipromosikan oleh para ilmuwan; (4) diperlukan pemberian kursus bahasa bagi para penerima beasiswa, baik bagi mahasiswa yang berasal dari Jerman maupun yang berasal dari kawasan Asia-Pasifik; dan (5) perlunya meningkatkan promosi perguruan tinggi Jerman.

Dalam kebijakannya tersebut, Jerman juga menyebutkan lima kepentingannya di kawasan Asia-Pasifik, antara lain:

erste, *Freunde erhalten, neue gewinnen*; **zweite** *die asiatische-pazifischen Staaten an Deutschland und Europa interessiert zu halten*; **dritte** *die Mitwirkung der asiatisch-pazifischen Staaten an der Behandlung aller wichtigen globalen Fragen einzufordern, dazu müssen wir aber auch asiatisch-pazifische Mitwirkung in allen wichtigen internationalen Foren fördern*; **vierte** *Öffnung und*

Kooperation in Asien/Pazifik zu fördern (China, Vietnam, ASEAN-Kooperation unter Einbeziehung des ehemaligen Indochina, vor allem verstärkte Kooperation auch in Südasien); fünfte bei akuten Gefahrenlagen helfend und vorbeugend tätig zu werden (Nichtverbreitung, Südasien, Korea). Dies wird vornehmlich im europäischen Kontext geschehen zu haben.

pertama mempertahankan hubungan persahabatan yang sudah lama terjalin dengan tujuan untuk memperoleh hubungan persahabatan yang baru (dengan negara mitra baru); *kedua* mempertahankan kepentingan yang dimiliki negara-negara Asia-Pasifik terhadap Jerman dan Eropa; *ketiga* mendorong keikutsertaan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dalam penyelesaian masalah global; *keempat* memajukan kerjasama di kawasan Asia-Pasifik (Cina, Vietnam, ASEAN, dan secara khusus mengintensifkan kerjasama dengan Asia Selatan); *kelima* secara proaktif membantu penyelesaian konflik (non poliferasi, Asia Selatan, Korea), hal tersebut terutama dilakukan dalam konteks Eropa.

3.2. Kebijakan Luar Negeri Jerman tahun 2002 untuk Kawasan Asia Tenggara

Dalam dokumen Kebijakan Luar Negeri yang diterbitkan oleh pemerintah Jerman pada 2002 untuk kawasan Asia Tenggara, Australia, New Zealand (NZ) dan kepulauan Pasifik⁷ disebutkan bahwa abad 21 akan menjadi abad bagi kawasan Asia. Namun perkiraan tersebut ternyata keliru karena terjadinya krisis keuangan yang melanda Asia pada 1997/1998 dan kekacauan politik setelah serangan 11 September 2001 serta adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara penting di kawasan untuk mencari strategi di dalam situasi yang baru. Meskipun demikian, bagi Jerman kawasan Asia Pasifik dengan jumlah negaranya, dengan perekonomian dan budayanya, dengan kemampuan S&T-nya serta peluang pasarnya yang besar, merupakan kawasan yang penting dan memiliki potensi untuk berkembang, meskipun dalam waktu yang sama kawasan tersebut juga menjadi saingan Jerman. Asia Tenggara merupakan kawasan yang

⁷ Kebijakan Luar Negeri Jerman untuk kawasan Asia Tenggara, Australia, New Zealand dan Kepulauan Pasifik di awal Abad 21 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jerman pada Mei 2002.

memiliki keanekaragaman etnik, agama, suku, politik dan ekonomi serta kaya dengan sumber daya alam. Di Indonesia, Myanmar, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand hidup kelompok etnik dan/atau agama minoritas dalam jumlah yang cukup besar dan berpengaruh. Meskipun ada negara yang menganut sistem pemerintahan otoriter dan paska komunis, namun fungsi-fungsi demokrasi ternyata sudah berkembang.

Kebijakan luar negeri Jerman terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara dijelaskan dalam dokumen *Aufgaben der deutschen Außenpolitik: Südostasien sowie Australien, Newseeland und Pazifische Inseln* (Tugas Kebijakan Luar Negeri Jerman: Asia Tenggara sebagaimana Australia, NZ dan Kepulauan Pasifik)⁸ tahun 2002. Dalam dokumen itu disebutkan fokus bidang dalam kebijakan luar negeri Jerman di kawasan Asia Tenggara yang terbagi dalam enam bidang, antara lain (1) demokrasi, aturan hukum dan hak asasi manusia, (2) perdamaian dan stabilitas, (3) kepentingan ekonomi, (4) lingkungan hidup, (5) kerjasama pembangunan, serta (6) sains dan budaya. Berikut akan dijelaskan satu per satu mengenai fokus bidang tersebut.

Pertama demokrasi, aturan hukum dan HAM. Menurut perjanjian PBB, syarat bagi tercapainya stabilitas politik, sosial dan pembangunan ekonomi ialah adanya demokrasi, aturan hukum serta penghargaan terhadap HAM. Persyaratan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi tujuan kebijakan luar negeri Jerman dalam membina kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Oleh karena itu Jerman terus memberikan dukungan dan konsultasi dalam pendirian atau penguatan lembaga konstitusional seperti parlemen, wartawan, hakim, kelompok pembela HAM, serikat dagang serta pasukan keamanan. Instrumen lain yang juga digunakan oleh Jerman yaitu program bantuan demokratisasi yang antara lain dilakukan melalui kegiatan observasi pemilihan umum, menyediakan layanan konsultasi dan pendidikan serta dukungan terhadap kebebasan pers. Perlindungan terhadap HAM merupakan bagian penting dari

⁸ *Aufgaben der deutschen Außenpolitik: Südostasien sowie Australien, Newseeland und Pazifische Inseln* merupakan dokumen yang berisi tentang kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jerman pada Mei 2002. Kebijakan luar negeri tersebut dibuat pada masa kepemimpinan Kanselir Gerhard Schröder

kepedulian Jerman kepada negara-negara di Asia Tenggara. Di sini Jerman secara khusus memberi fokus terhadap perlindungan HAM di Myanmar dan dukungan kepada negara lainnya dalam membangun instrumen kelembagaan untuk melindungi HAM. Sedangkan Indonesia dilihat Jerman sebagai stabilisator keamanan di kawasan, sebab ancaman dari kelompok ekstrim Islam pada fase pertumbuhan di Indonesia dilihat sebagai bentuk ancaman tersendiri bagi stabilitas keamanan negara-negara tetangganya. Perhatian Jerman di Filipina dan Malaysia terfokus kepada desentralisasi, pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan serta stabilitas keamanan antar kelompok etnik dalam masyarakat. Perhatian kepada Vietnam dan Laos tertuju kepada proses perubahan politik di kedua negara tersebut untuk menjadi negara yang berdemokrasi dan menganut ekonomi pasar. Kamboja disebutkan juga sedang membutuhkan bantuan Jerman khususnya dalam proses menuju negara yang demokratis, yang menganut sistem ekonomi pasar dan memiliki aturan hukum yang lebih baik.

Kedua perdamaian dan stabilitas. Jerman berkepentingan untuk meyakinkan kawasan Asia Tenggara akan pentingnya membangun kepercayaan regional dan terbangunnya kebersamaan untuk mencegah terjadinya konflik di kawasan. Hubungan rutin yang terjalin dengan beberapa negara di kawasan khususnya dalam bidang pendidikan militer tidak bertujuan untuk memperkuat kemampuan perang melainkan bertujuan untuk mengenalkan pengalaman yang dimiliki Jerman tentang peran angkatan bersenjata dalam menjaga keamanan bersama. Dalam hal ini Singapura dan Thailand tertarik untuk mengadakan dialog dengan Jerman tentang pendidikan militer dan pencegahan konflik. Instrumen yang digunakan dalam bidang ini ialah melakukan dialog tentang pengalaman Jerman dalam bidang militer, mengadakan program pendidikan bagi masyarakat sipil dan militer, konferensi dengan tema pencegahan krisis keamanan serta konsultasi kelembagaan bagi masyarakat sipil untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan angkatan bersenjata. Namun demikian, Jerman melakukan kerjasama dalam bidang keamanan dan militer setelah mendapat persetujuan dari negara-negara mitra Jerman di Uni Eropa dan negara-negara perwakilan yang tergabung

dalam ARF (ASEAN Regional Forum⁹), antara lain Australia, New Zealand, Jepang dan USA. Ancaman global melalui aksi terorisme internasional, kejahatan transnasional yang terorganisir, migrasi ilegal, pembajakan dan perdagangan manusia juga dimasukkan dalam agenda dialog dengan negara mitra.

Ketiga kepentingan ekonomi. Keamanan bagi kepentingan ekonomi Jerman di kawasan Asia Tenggara tergantung kepada stabilitas ekonomi di kawasan tersebut. Reformasi politik dan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara harus terus dilakukan baik oleh masing-masing negara maupun dengan dukungan komunitas internasional. Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina memiliki tanggung jawab yang besar dalam reformasi struktural yang sudah mulai dilakukan, misalnya dengan membuka pasar, mendorong investasi, aturan persaingan usaha dan kepailitan, pengawasan perbankan, serta manajemen ekonomi makro¹⁰. Negara-negara yang memiliki potensi untuk menjadi negara industri tersebut memiliki minat yang besar terhadap pengalaman Jerman dalam membangun sistem pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memperbaiki kemajuan investasi dan teknologi. Jerman memandang bahwa keterlibatannya dalam kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara dapat memberi efek positif bagi perekonomian dalam negerinya, misalnya dengan menyediakan tenaga ahli. Sehingga pemerintah federal dan kementerian perdagangan luar negeri Jerman menaruh perhatian yang cukup besar dalam tugas tersebut. Instrumen yang digunakan dalam kerjasama ekonomi antara lain informasi, promosi dan dialog ekonomi politik, kerjasama dengan asosiasi perusahaan dalam forum ekonomi

⁹ ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada 1994 sebagai suatu wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Dalam kaitan tersebut, ASEAN merupakan penggerak utama dalam ARF. ARF juga merupakan satu-satunya forum di level pemerintahan yang dihadiri oleh seluruh negara-negara kuat di kawasan Asia Pasifik dan kawasan lain seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Jepang, Rusia dan Uni Eropa.

¹⁰ Ekonomi makro yang sering juga ditulis mikroekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga; dan bagaimana harga, pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya.

bersama, meningkatkan konsultasi pemerintahan dalam kerangka kerjasama pembangunan politik dan program-program pelatihan dan pendidikan. Pasar tenaga kerja Jerman akan dikontrol dan ditujukan untuk menciptakan tenaga ahli yang berkualitas dan memiliki keinginan untuk mendapatkan pengalaman profesional.

Keempat lingkungan hidup. Meningkatnya suhu bumi dan permukaan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi daerah pantai, dalam hal ini yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sehingga kawasan Asia Tenggara merupakan partner penting dalam kerjasama dalam bidang lingkungan hidup ini. Kawasan Asia Tenggara yang memiliki kekayaan alam khususnya keragaman hayatinya sedang menghadapi ancaman kerusakan lingkungan dan kerusakan hutan. Asia Tenggara adalah kawasan yang paling cepat kehilangan hutan alamnya di dunia dan hal tersebut juga menjadi perhatian Jerman, sehingga perlindungan hutan dimasukkan ke dalam topik kerjasama pembangunan dan kerjasama S&T dengan Indonesia. Meningkatnya kegiatan industrialisasi menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan energi, di mana hal tersebut kemudian bisa berdampak pada kerusakan lingkungan. Kegiatan industrialisasi menyebabkan naiknya permintaan terhadap teknologi lingkungan. Instrumen-instrumen yang diperlukan untuk membangun posisi Jerman ke dalam pasar teknologi lingkungan masa depan antara lain pemberian konsultasi untuk membuat peraturan terkait dengan lingkungan hidup, penawaran teknologi, pendidikan, serta bantuan keuangan.

Kelima kerjasama pembangunan. Topik-topik dalam kerjasama pembangunan untuk kawasan Asia Tenggara disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing negara, sehingga kebijakan tersebut dibuat terpisah sebagaimana halnya dengan kerjasama dalam bidang S&T. Namun secara umum disebutkan bahwa kerjasama keuangan di kawasan Asia Tenggara sudah bisa kembali dijalankan dengan negara yang sudah maju pembangunannya seperti Malaysia dan Thailand, dengan memfokuskan komitmen pemerintah Jerman terhadap layanan konsultasi pemerintah dan target-target bantuan teknis. Bagi negara-negara yang kurang berkembang seperti Vietnam, Kamboja atau Laos, pemerintah Jerman memperlihatkan komitmennya dengan memberikan bantuan dalam

kerjasama teknik, kerjasama keuangan, kerjasama pembangunan infrastruktur dasar serta kerjasama melawan kemiskinan.

Keenam kerjasama sains dan budaya. Sebagian besar elit masa depan dari kawasan Asia Tenggara meneruskan pendidikan mereka di Inggris, USA dan di Australia. Dari negara-negara ASEAN jumlah mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di Jerman pada 1999 hanya sebesar 2900 mahasiswa, di mana separuh dari total itu adalah mahasiswa yang berasal dari Indonesia. Dari Singapura hanya ada 69 mahasiswa yang kuliah di Jerman padahal Singapura adalah mitra dagang terpenting Jerman di kawasan Asia Tenggara. Kenyataan tersebut dilihat sebagai penghalang bagi usaha Jerman untuk memelihara hubungan jangka panjang dengan negara-negara di Asia Tenggara dan menghalangi kegiatan promosi Jerman dalam bidang ekonomi, politik dan budaya. Oleh karena itu Jerman harus melakukan upaya untuk memenangkan persaingan tersebut yang salah satunya dilakukan dengan memberi prioritas pada pemeliharaan hubungan dengan mahasiswa yang pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jerman. Keseriusan pemerintah Jerman untuk mengupayakan peningkatan kerjasama dalam bidang ini juga ditunjukkan dengan membuat kebijakan khusus dalam bidang S&T yang juga diberi nama Konsep Asia 2002¹¹ yang dibuat oleh Kementerian Federal bidang Pendidikan dan Penelitian (BMBF). Itulah yang menjadi alasan mengapa kebijakan bidang S&T tidak dimuat secara detil dalam kebijakan luar negeri Jerman tahun 2002. Konsep ini disusun karena Jerman melihat Asia sebagai kawasan yang paling penting jika dilihat dari sudut pandang politik, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah mengalami krisis Asia pada 1997/1998 yang berdampak besar pada perekonomian dunia, situasi ekonomi di kawasan Asia saat ini telah stabil dan bahkan perekonomian di beberapa negara telah mengalami peningkatan. Aspek-aspek berikut memainkan peran penting dalam kerjasama yang dibiayai langsung oleh BMBF, *pertama* perspektif pendidikan dan kondisi kebijakan riset. Perkembangan pendidikan dan riset memiliki ketergantungan terhadap pertukaran dan kolaborasi dengan pusat kompetensi terpenting di dunia. Perbedaan aktor dalam kerjasama internasional

¹¹ Bab 1

tentunya menuntut adanya pendekatan yang berbeda. Dalam aturannya, BMBF hanya bekerjasama dengan negara-negara yang tertarik dengan proyek ilmu pengetahuan Jerman yang dibiayai oleh BMBF; *kedua* perspektif ekonomi. Kerjasama antar lembaga penelitian dengan berbagai negara merupakan persyaratan untuk pengembangan inovasi dan untuk membuka pasar-pasar baru. Hal tersebut akan dapat memudahkan masuknya produk-produk baru ke dalam pasar dunia. Dalam banyak hal, kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh BMBF berorientasi pada pasar. Oleh karena itu kepentingan ekonomi dan kepentingan industri juga memainkan peran yang penting. Jerman turut berpartisipasi secara aktif mendukung industri Jerman dalam Komite Asia Pasifik; *ketiga* kepentingan politik. Jerman menerima tanggung jawab internasionalnya dalam kerjasama bilateral dalam bidang pendidikan dan riset. Kerjasama tersebut memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah global dan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya bagi mitra kerjasama. Melalui kerjasama tersebut, negara-negara mitra di dunia akan menghargai Jerman. Di sisi lain Jerman juga membutuhkan mitra internasional dalam bidang ilmu pengetahuan, industri dan politik yang mengenal dan menghargai Jerman.

Tabel berikut akan menggambarkan perkembangan topik kerjasama yang dimuat dalam kebijakan luar negeri Jerman terhadap kawasan Asia-Pasifik pada 1993 yang kemudian difokuskan untuk kawasan Asia Tenggara dan Pasifik pada 2002.

Tabel 7
Tujuan Kebijakan Luar Negeri Jerman
pada tahun 1993 dan 2002

No.	Topik Kerjasama	1993	2002
1.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong perluasan kerjasama ekonomi dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. • Menarik investasi asing masuk ke negara- 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan promosi dan dialog ekonomi politik. • Meningkatkan kerjasama dengan asosiasi perusahaan dalam forum ekonomi

		negara bagian baru di Jerman.	bersama. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan konsultasi pemerintahan dalam kerangka kerjasama pembangunan politik melalui program-program pelatihan dan pendidikan. • Meningkatkan kualitas tenaga kerja Jerman.
2.	S&T	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kegiatan transfer teknologi hingga <i>joint venture</i> bagi kerjasama perusahaan Jerman dan perusahaan di kawasan Asia-Pasifik 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama untuk mengembangkan inovasi dan untuk membuka pasar-pasar baru. Melalui kerjasama tersebut maka produk-produk baru Jerman akan mudah ke dalam pasar dunia. • Untuk berkontribusi mengatasi masalah global. • Meningkatkan penghargaan negara mitra kepada Jerman.
3.	Lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama transfer teknologi dan ilmu pengetahuan untuk mengurangi dampak polusi udara, pengolahan air limbah, keamanan bahan-bahan kimia dan pemantauan kerusakan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama dalam bidang perlindungan hutan. • Kerjasama dalam bidang ini akan meningkatkan permintaan terhadap teknologi lingkungan buatan Jerman.
4.	Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama bidang telekomunikasi untuk 	-

		<p>mempromosikan dan mengenalkan standar telekomunikasi Eropa, dengan tujuan untuk memperbesar peluang bisnis bagi penyedia layanan telekomunikasi asal Jerman.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan bekerjasama dengan negara mitra di kawasan Asia-Pasifik, Jerman bisa mendapatkan informasi tentang trend penyedia jaringan operator dari negara lain, yang memungkinkan Jerman untuk bisa terus berinovasi. 	
5.	Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi kemiskinan melalui promosi pekerjaan produktif. • Mempromosikan pendidikan dan kesehatan. • Meningkatkan kemampuan negara mitra untuk berkompetisi melalui teknologi transfer dan keterampilan teknis. • Mendukung kerjasama sektor swasta melalui perbaikan undang-undang investasi, pendidikan kejuruan, promosi kerjasama antar negara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jerman meningkatkan kerjasama keuangan untuk negara yang sudah maju pembangunannya,. • Jerman memberikan bantuan dalam kerjasama teknik, kerjasama keuangan, kerjasama pembangunan infrastruktur dasar untuk melawan kemiskinan untuk negara yang kurang berkembang.
6.	Pendidikan, sains dan budaya,	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kembali kepercayaan negara- 	Menjadi satu dalam kerjasama S&T

	pendidikan kejuruan, dialog media and dialog sosial.	<p>negara Asia-Pasifik kepada sistem pendidikan Jerman untuk berkompetisi melawan USA, Inggris, dan Australia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memfokuskan pemberian beasiswa kepada mahasiswa paska sarjana dan ilmuwan. • Mempromosikan proyek kepada melalui peran para ilmuwan. • Memberikan kursus bahasa kepada para penerima beasiswa. • Meningkatkan promosi perguruan tinggi kepada negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. 	
7.	Demokrasi, aturan hukum, HAM	-	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan dan konsultasi dalam pendirian atau penguatan lembaga konstitusional. • Membantu usaha demokratisasi melalui observasi pemilihan umum. • Menyediakan layanan konsultasi. • Memberikan pendidikan. • Mendukung kebebasan pers.
8.	Perdamaian dan stabilitas	-	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan dialog tentang pengalaman Jerman dalam bidang militer.

			<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan konferensi dengan tema pencegahan krisis keamanan. • Konsultasi kelembagaan bagi rakyat sipil untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan angkatan bersenjata.
--	--	--	--

Tabel di atas menunjukkan terjadinya pergeseran dan pengembangan fokus kerjasama yang dilakukan oleh Jerman kepada negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Telah disebutkan di awal bab ini, bahwa terjadinya serangkaian peristiwa global, antara lain terjadinya krisis keuangan yang terjadi di Asia pada 1997/1998 dan serangan teroris 11 September 2001, telah mempengaruhi negara-negara di dunia dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kita bisa mengambil contoh di atas, bahwa pada 2002 Jerman memasukkan dua fokus baru dalam kebijakan luar negerinya untuk kawasan Asia Tenggara, yaitu *pertama* demokrasi, aturan hukum dan HAM dan yang *kedua* ialah perdamaian dan stabilitas. Jerman melihat bahwa krisis keuangan 1997/1998 memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perkembangan negara-negara yang terkena imbas oleh krisis tersebut. Di samping itu, terdapat dua kerjasama yang mendapat perhatian lebih dari Jerman sebagaimana tertuang dalam kebijakan luar negerinya yang dikeluarkan pada 2002, yaitu kerjasama dalam bidang S&T dan kerjasama pembangunan. Sebagai negara yang dikenal sebagai negara teknologi, Jerman ingin memperbesar pengaruhnya dalam bidang itu di kawasan Asia Tenggara. Untuk maksud itulah dibuat *Asia Concept* yang juga diterbitkan pada tahun pada 2002. Kerjasama dalam bidang pembangunan juga mendapat perhatian khusus sehingga dibuat juga kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan permintaan dari negara mitra di kawasan Asia Tenggara.

Perubahan arah kebijakan luar negeri pada 2002 menunjukkan adanya nilai yang ingin disampaikan oleh Jerman. Sebagaimana disebutkan pada bab 1, Brown

mengklasifikasikan teori etika dalam kebijakan luar negeri ke dalam empat prinsip, yaitu prinsip keamanan, prinsip kesejahteraan, prinsip kualitas hidup dan prinsip saling menghormati. Berikut akan dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam kebijakan luar negeri Jerman pada 2002.

Pertama prinsip keamanan. Jerman berkepentingan terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena Jerman memberikan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai demokrasi, aturan hukum, HAM, perdamaian dan stabilitas keamanan. Jerman memandang pentingnya membangun kepercayaan regional dan pentingnya membangun kepercayaan untuk mencegah terjadinya konflik di kawasan. Jerman melihat bahwa keanekaragaman etnik, agama dan budaya yang ada di kawasan Asia Tenggara di satu sisi memiliki nilai khusus yang tidak dimiliki oleh kawasan yang lain, namun di waktu yang bersamaan hal tersebut dapat menjadi sumber perpecahan. Sehingga Jerman berkepentingan untuk berperan aktif dalam mendukung terciptanya situasi yang aman di kawasan Asia Tenggara. Hal ini juga semata-mata karena Jerman memiliki latar belakang ekonomi terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara. Terjadinya konflik di kawasan Asia Tenggara akan memberi pengaruh negatif kepada perekonomian Jerman, karena Asia Tenggara merupakan pasar yang besar bagi produk-produk buatan Jerman. Begitu juga dengan promosi demokrasi, aturan hukum, HAM, perdamaian dan stabilitas yang juga memiliki nilai ekonomi, sebab darinya Jerman dapat menjual kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya melalui kegiatan konsultasi, dialog dan pelatihan yang dilakukan oleh para tenaga ahli Jerman. Meningkatnya kesadaran masyarakat Asia Tenggara terhadap prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, HAM, perdamaian dan stabilitas akan mendorong mereka untuk lebih meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya melalui kegiatan dialog, pelatihan dan konsultasi. Sehingga Jerman memiliki peluang untuk menjual pengalaman dan kemampuan para tenaga ahlinya dalam bidang-bidang tersebut. Prinsip keamanan ini juga berlaku dalam kerjasama S&T. Telah disebutkan di atas bahwa Jerman memiliki kekuatiran khusus terkait dengan minimnya jumlah mahasiswa dari kawasan Asia Tenggara yang melanjutkan studi di Jerman. Menurunnya jumlah mahasiswa yang melanjutkan studi di Jerman dilihat sebagai penghalang

bagi usaha Jerman untuk memelihara hubungan jangka panjang dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan juga akan menghalangi kegiatan promosi Jerman dalam bidang teknologi, ekonomi, politik dan budaya. Dalam hal ini Jerman berkepentingan untuk menyelamatkan aset masa depannya, yaitu mahasiswa-mahasiswa dari kawasan Asia Tenggara yang setelah mereka kembali ke negara mereka masing-masing untuk tetap dapat memelihara hubungan dengan Jerman yang secara tidak langsung dapat mempromosikan Jerman di kawasan.

Kedua prinsip kesejahteraan. Kesejahteraan terkait erat dengan perekonomian. Jerman memiliki kepentingan untuk ikut berperan aktif dalam menyejahterakan masyarakat di kawasan Asia Tenggara sebab jika masyarakat memiliki kehidupan yang layak, maka itu akan memberi jaminan terhadap keamanan dan stabilitas di masing-masing negara di kawasan. Jika masyarakat dapat hidup dengan layak dan sejahtera, hal itu juga berarti bahwa mereka juga akan dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam bidang pendidikan. Jika masyarakat dapat hidup layak dan memiliki pendidikan untuk selanjutnya mendapatkan pekerjaan yang layak, maka mereka tidak akan mudah dihasut untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum. Di negara yang memiliki tingkat perekonomian baik atau tinggi, dapat dilihat bahwa tingkat kriminalitasnya rendah. Sebaliknya, di negara yang memiliki tingkat perekonomian rendah, tingkat kriminalitasnya akan tinggi. Sehingga tidak mengherankan jika Jerman juga memiliki kepentingan terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara sebab jika kehidupan masyarakat sejahtera, maka keamanan negara juga akan terjamin. Keamanan negara di kawasan Asia Tenggara sebagaimana disebutkan di atas, merupakan poin yang penting untuk menjamin kelangsungan ekonomi Jerman di kawasan. Sehingga untuk memperjuangkan kepentingannya dan sekaligus ikut serta menyejahterakan masyarakat kawasan, Jerman membuat beberapa langkah kebijakan, salah satunya dalam bidang S&T yang di dalamnya juga termasuk program pemberian beasiswa dan kegiatan pelatihan.

Ketiga prinsip kualitas hidup. Kegiatan industrialisasi dan pertumbuhan penduduk di kawasan Asia-Pasifik telah memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kerusakan lingkungan, baik di tingkat lokal, regional maupun di tingkat

global. Hal ini juga mendapat perhatian penuh dari Jerman yang melihat tingginya dampak yang dapat dihasilkan dari kegiatan industrialisasi, misalnya peningkatan CO₂ yang dapat merusak lapisan ozon serta kerusakan lingkungan akibat limbah pabrik yang tidak diolah dengan benar sehingga dapat mengancam kualitas kehidupan masyarakat di sekitar pabrik. Oleh karena itu promosi penggunaan teknologi yang ramah energi dan pemanfaatan energi alternatif sangat diperlukan. Hal inilah yang melatarbelakangi Jerman untuk tetap melanjutkan program kerjasama dalam bidang lingkungan karena Jerman memperhatikan kualitas hidup masyarakat dan ingin ikut serta membantu mengurangi polusi udara dan meminimalisasi dampak limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industrialisasi. Dalam bidang ini Jerman menawarkan kegiatan transfer teknologi dan pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup, di mana pada akhirnya hal ini juga akan memberi dampak positif terhadap perekonomian Jerman karena secara tidak langsung negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan membutuhkan bantuan konsultasi dan pelatihan dari Jerman terkait dengan masalah lingkungan tersebut. Jerman juga secara tidak langsung akan melakukan promosi terhadap teknologi ramah lingkungan buatan negaranya. Sehingga selain ikut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama lingkungan, Jerman juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya (baik tenaga ahlinya maupun industrinya) yang bergerak dalam bidang teknologi yang ramah lingkungan.

Keempat prinsip saling menghormati. Prinsip ini dapat kita lihat pada kebijakan luar negeri Jerman tahun 2002 pada poin kedua, yang menyebutkan tentang perdamaian dan stabilitas. Pada poin itu disebutkan bahwa hubungan rutin yang terjalin dengan beberapa negara di kawasan khususnya dalam bidang pendidikan militer tidak bertujuan untuk memperkuat kemampuan perang melainkan bertujuan untuk mengenalkan pengalaman yang dimiliki Jerman tentang peran angkatan bersenjata dalam menjaga keamanan bersama. Hubungan yang rutin tersebut dilakukan Jerman setelah mendapat persetujuan dari negara-negara mitra Jerman di Uni Eropa dan negara-negara perwakilan yang tergabung dalam ARF, antara lain Australia, New Zealand, Jepang dan USA. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Jerman menyadari kemampuannya dalam bidang

militer, namun Jerman masih menghormati prinsip-prinsip yang harus ditaatinya sebagai anggota Uni Eropa dan adanya Forum Regional ASEAN, di mana Amerika Serikat, Australia, Jepang, Cina dan Rusia tergabung di dalamnya.

Dari penjelasan tersebut di atas, terlihat bahwa kepentingan ekonomi menjadi pusat dalam kebijakan luar negeri Jerman. Kepentingan ekonomi yang dimaksud ialah mengamankan ekonomi Jerman di kawasan Asia Tenggara melalui keterlibatan aktif Jerman dalam promosi demokrasi, aturan hukum, HAM, perdamaian dan stabilitas. Keikutsertaan Jerman dalam menyejahterakan masyarakat di kawasan Asia Tenggara juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekonomi dalam negeri Jerman. Partisipasi aktif Jerman tersebut ditunjukkan dengan memberikan beasiswa dan pelatihan bagi mahasiswa maupun masyarakat dari kawasan Asia Tenggara untuk tujuan jangka panjang, yakni untuk tetap membina hubungan persahabatan, di mana Jerman secara tidak langsung memiliki harapan akan meningkatnya permintaan layanan pendidikan dan pelatihan terhadap Jerman. Meskipun demikian Jerman masih memegang etika dalam pembuatan kebijakan luar negerinya, bahwa dalam setiap kegiatan kerjasama yang dijalankan, Jerman mengajak adanya partisipasi yang aktif dari negara-negara di kawasan. Partisipasi aktif yang dimaksudkan ialah bahwa bantuan kerjasama diberikan berdasarkan permintaan dari negara mitra di kawasan Asia Tenggara dan karena kerjasama tersebut memang diperlukan. Jadi kerjasama tidak begitu saja ditawarkan kepada negara tujuan.